



## TELAAHAN STAF/PERSONEL

Tentang

### PENGUATAN ORGANISASI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI

#### **A. DASAR**

1. Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 52 tahun 2010, tanggal 4 Agustus 2010, tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Peraturan Kepala Kepolisian negara RI Nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010, tentang susunan Organisasi dan tata kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lampiran "Q" Bareskrim Polri;
6. Rencana kerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun anggaran 2016.

#### **B. PERENCANAAN**

Struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri belum mengakomodasi kebutuhan faktual operasional di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, sehingga menyebabkan penempatan sumber daya manusia tidak dapat dipenuhi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem keuangan pemerintah yang saat ini sudah menerapkan mekanisme Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Adanya kelemahan dibidang ini pada akhirnya menyebabkan menurunnya kinerja Dittipidkor di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi secara signifikan.

Struktur organisasi yang diharapkan dibangun di Dittipidkor pada dasarnya mengakomodasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan seperti fungsi dibidang penelusuran dan pengembalian asset (*asset tracing and recovery*), pengelolaan pengaduan masyarakat dan fungsi dukungan data informasi kegunaan peralatan dan keahlian khusus (*surveillance, penyadapan, DF, dan analyst IT*). Selanjutnya untuk mengakomodasi pelaksanaan tugas dibidang operasional akan dikelola oleh dua bidang yaitu bidang data dan anev serta bidang administrasi penyelidikan dan penyidikan.

Untuk memperjelas hal tersebut berikut rekapitulasi kekuatan personil Dittipidkor Bareskrim Polri menurut dislokasi sesuai DSP berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : PERKAP / 21 / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian negara Republik Indonesia Lampiran "Q" Bareskrim Polri, sebagai berikut :



Personel Polri

NO	PANGKAT	POLRI		+/-	KET
		DSP	RIL		
1	2	3	4	5	6
1	BRIGJEN	1	1	-	PATI
2	KOMBES	6	6	-	PAMEN
3	AKBP	27	25	- 2	
4	KOMPOL	29	13	- 16	
5	AKP	25	8	-17	PAMA
6	IPTU	1	1	-	
7	IPDA	1	5	+4	BA
8	AIPTU	27	-	- 2	
9	AIPDA		-		
10	BRIPKA		10		
11	BRIGADIR		6		
12	BRIPTU		3		
13	BRIPDA		6		
<b>JUMLAH</b>			<b>117</b>		<b>84</b>

❖ Personel PNS.

NO	PANGKAT	PNS		+/-	KET
		DSP	RIIL		
1	2	3	4	5	6
1	PENATA I	3	3	+ 3	GOL III
2	PENATA		1		
3	PENDA I		2		
4	PENDA		-		
5	PENGATUR I	15	4	- 3	GOL II
6	PENGATUR		4		
7	PENGDA I		3		
8	PENGDA		-		
9	JURU I		1		
10	JURU		-		
11	JURDA I		-		
12	JURDA		-		
13	CPNS		-		
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>18</b>		

Faktor ketidaksiapan struktur organisasi merupakan hal yang paling mendasar yang membawa pengaruh pada kinerja operasional Direktorat Tindak Pidana Korupsi secara keseluruhan. Dengan kondisi saat ini dimana kekuatan personil sangat minim untuk menunjang tugas yang semakin padat jika dilihat dari penugasan yang diemban secara struktural maupun non struktural guna untuk meningkatkan pengungkapan kasus. Dimana Faktor ketidaksiapan struktur organisasi inilah merupakan hal yang paling mendasar yang membawa pengaruh pada kinerja operasional Direktorat Tindak Pidana Korupsi secara keseluruhan.

### C. PELAKSANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI

Terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi penuntasannya tidak hanya sebatas menghukum para pelaku/terlapor, tetapi yang diharapkan mengambil langkah tindak untuk penggantian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi.

Salah satunya adalah asset para pelaku dimana penyidik menelusuri dan mencari harta koruptor hingga dapat dilakukan penyitaan dan mencari asset harta kekayaan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penelusuran dan pencarian asset para pelaku dibutuhkan langkah-langkah khusus, tim khusus (personel yang memiliki kemampuan khusus), bahkan sarana prasarana khusus. Untuk itu, Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan kebijakan dalam penguatan organisasi antara lain:

## **1. Bidang Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan Visi dan Misi Kapolri saat ini menuntut SDM yang PROFESIONAL yaitu: meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang mudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya. Serta Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan hak asasi manusia. Hal tersebut diwujudkan Dittipidkor Bareskrim Polri dengan:

### **1) Mengisi kekosongan personel**

Upaya yang dilakukan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam mengatasi minimnya kekuatan personel dalam menunjang tugas yaitu dengan mengajukan permohonan BKO/perbantuan personel dari wilayah. Berikut Rekap data personel dari wilayah yang melaksanakan BKO pada Dittipidkor Bareskrim Polri:

#### **REKAP PERS BKO :**

ANGGOTA	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4
<b>POLRI</b>			
- PAMEN	3	-	3
- PAMA	10	2	12
- BA	8	-	8
<b>PNS</b>			
- GOL III	-	-	-
- GOL II	-	-	-
- GOL I	-	-	-
<b>TOTAL</b>	21	2	23

## 2) **Meningkatkan kemampuan SDM**

Untuk meningkatkan kemampuan personel, pada tahun 2016 Dittipidkor Bareskrim Polri merencanakan melaksanakan pelatihan internal penyidik dan staf Dittipidkor Bareskrim Polri pada bulan Februari 2016 dan melaksanakan Rapat kerja Teknis penyidik Tindak Pidana Korupsi pada bulan Agustus 2016. Dimana kegiatan Pelatihan Internal Penyidik dan Staf Dittipidkor Bareskrim Polri dan kegiatan Rapat kerja Teknis penyidik tindak pidana korupsi tahun anggaran 2016 yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi yang sangat baik bagi para peserta dalam rangka meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia dilingkungan personel Dittipidkor Bareskrim Polri sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas dan performance serta integritas sehingga meningkatkan keberhasilan kinerja penanganan tindak pidana korupsi. Serta dapat menciptakan net working sesama penegak hukum dengan menjalin keharmonisan dalam berkomunikasi.

Pelaksanaan peningkatan sumber daya pada personel Dittipidkor Bareskrim Polri pada tahun 2016 sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan Pelatihan Internal Penyidik dan Staf Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri

#### ▪ Waktu dan Tempat:

Pelaksanaan pelatihan internal penyidik dan staf Dittipidkor Bareskrim Polri berlangsung dari tanggal 17 s.d 19 februari 2016, bertempat di Galaxi Resort Jl. Hanjawar Pacet, Cipanas Puncak Cianjur.

#### ▪ Peserta:

Pelatihan Internal penyidik dan Staf Dittipidkor Bareskrim Polri diikuti oleh 106 orang penyidik dan staf Dittipidkor Bareskrim Polri.

#### ▪ Tujuan:

- Meningkatkan kemampuan Profesionalitas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dengan melakukan strategi penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

- Diharapkan setelah mengikuti pelatihan internal penyidik dan staf Dittipidkor Bareskrim Polri bagi peserta memperoleh persamaan persepsi dan bekal pengetahuan, kemampuan dan pemahaman berkaitan penanganan Tindak Pidana Korupsi, sehingga meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- b. Pelaksanaan Rapat kerja Teknis Penyidik Tindak Pidana Korupsi
- Waktu dan Tempat:  
Waktu pelaksanaan Rakernis Penyidik Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2016 berlangsung dari tanggal 26 s.d 28 Juli 2016 dan bertempat di Pusdik Reskrim Lemdikpol Megamendung Bogor.
  - Peserta:  
Peserta Rakernis Penyidikan tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2016, diikuti oleh 64 (enam puluh empat) personel, yaitu seluruh para kasubdit Dit Reskrimsus Polda dan perwakilan Kasat Reskrim Polres/ta dengan rincian sebagai berikut:
    - Kasubdit Tipidkor Polda sebanyak : 32 orang
    - Kasat Reskrim Polres/ta sebanyak : 32 orang
  - Tujuan:  
Tujuan pelaksanaan Rakernis adalah untuk merapatkan barisan, membulatkan tekad dan komitmen aparat penegak hukum khususnya penyidik Tipidkor Polri dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dengan melakukan strategi transparansi dibidang penyelidikan dan penyidikan guna menjamin kepastian hukum rasa keadilan.

Selain itu, Dalam rangka meningkatkan kapasitas Penyidik/ Penyidik Pembantu telah dilakukan / diikutsertakan pada pelatihan / Dikbangspes baik dalam maupun Luar Negeri seperti ILEA Bangkok, JCLEC, ICI TAP;

## **2. Bidang Gakkum (terkait SDM)**

Dalam bidang penegakkan hukum, Dittipidkor Bareskrim Polri mengacu pada visi dan misi Kapolri yang MODERN: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan almatsus dan alpalkam yang semakin modern. Serta meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik.

Berdasarkan surat perintah Direktur Dittipidkor Bareskrim Polri saat ini telah dibentuk 3 (tiga) satuan tugas yang non struktural yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang penyelidikan dan penyidikan antara lain:

### **a) Pengaduan Masyarakat (Dumas)**

Satuan tugas bidang pengaduan masyarakat yang bertugas utamanya adalah menerima dan memeriksa kelengkapan laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, melakukan verifikasi, melakukan analisis hingga memberikan saran kepada pimpinan sehubungan dengan tindak lanjut dari sebuah laporan atau pengaduan masyarakat. Dumas tersebut dapat diterima secara langsung maupun tidak langsung yang kesemuanya dilayani dan ditangani oleh piket Dumas.

Dimana pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat diperoleh data laporan pengaduan masyarakat yang diterima dan dilayani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai berikut:

Tahun 2013	: 454 laporan
Tahun 2014	: 674 laporan
Tahun 2015	: 774 laporan

Mengacu pada data diatas, banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang dilaporkan pada Dittipidkor Bareskrim Polri baik secara langsung maupun tidak langsung otomatis cukup menyerap sumber daya personel Dittipidkor Bareskrim Polri, sedangkan dalam struktur organisasi yang ada tidak tercantum subdit khusus penanganan Dumas.

## 1) Alat khusus (Alsus)

Satuan tugas bidang penyelidikan khusus dengan memanfaatkan peralatan khusus (Alsus) dengan fungsi utama dibidang *surveillance, direct finder dan IT and investigation analyst*. Personel yang tergabung didalam satuan tugas ini adalah merupakan personel yang memiliki kemampuan dan pengetahuan khususnya dibagian IT agar dapat mengoperasikan alsus ini secara tepat sasaran dan tepat guna dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Daftar alsus yang dimiliki oleh Dittipidkor Bareskrim Polri sampai saat ini antara lain:

### DAFTAR ALSUS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Alat DF Active + Pasive Chameleon	2 buah
2	Honda CRV (Mobil Pendukung DF)	2 buah
3	Kamera Digital Merk Canon SLR EOS 7D	6 buah
4	Cap Spy Camera with Remote Control Corner Stone Product	3 buah
5	Sunglasses Spy Camera Corner Stone Product	3 buah
6	Watch Spy Camera Corner Stone Product	3 buah
7	GPS Tracker Corner Stone Product	6 buah
8	GPS Indoor merk Garmin Nuvi 2577	6 buah
9	Radio Komunikasi (HT) merk GP328 Plus	6 buah
10	Repeater HT merk Motorola GR 500	2 buah
11	Computer Tablet	10 buah
12	handy cam Sony HDR-PJ790	10 buah
13	CCTV Vandalproof IR Dome Camera	4 buah
14	Scanner merk Canon DR2020U	2 buah
15	Projector / Infocus merk Epson EB-1940W	2 buah
16	Projector / Infocus Portable merk Epson EB-1771W	4 buah
17	Mesin Penghancur Data (Kertas / CD ) New United RT-12C	3 buah
18	Laptop Merk Dell Precision M6700	5 buah
19	Printer merk Canon Pixma iX7000	3 buah
20	PC Desktop merk Dell Studio XPS 8500	4 buah
21	Handphone GSM iPhone5	12 buah
22	R4 merk Toyota Fortuner 2.7 G A/T LUX	1 unit
23	R4 merk Mitsubishi Pajero 2.5D Exceed (4x2) AT 2013	1 unit
24	R4 merk Honda CRV 2.4 AT	1 unit



25	R4 merk Toyota Avanza Veloz 1.5 AT	3 unit
26	R2 merk Honda Vario Techno 125 CBS OR	10 buah
27	R2 merk Honda CBR 150 R	2 buah
28	R2 Kawasaki Ninja 250 R	2 buah
29	Tas Ransel Laptop	80 buah
30	TV 42"	4 buah

Dengan pengelolaan alsus yang tepat, diharapkan dapat mendukung dan membantu dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

## **2) Asset tracing and recovery (Tim ATR)**

Satuan tugas bidang pencarian dan penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi (Tim ATR/*asset tracing and recovery*) dengan tugas utama memberikan dukungan dari tim penyidik/penyelidik untuk melakukan proses pencarian dan penelusuran aset yang diduga merupakan hasil atau digunakan dalam tindak pidana korupsi. Tim ATR ini sangatlah membantu dan mendukung penyidik didalam penelusuran dan pencarian aset-aset para pelaku tindak pidana korupsi hingga penyidik/penyelidik dapat mengambil langkah penyitaan hingga penggantian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa keberadaan ketiga satuan tugas ini sangat diperlukan didalam operasional kegiatan penyelidikan penyidikan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, efektifitasnya perlu mendapat perhatian ekstra dikarenakan saat ini belum tersedianya sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, perubahan struktur organisasi pada Dittipidkor Bareskrim Polri merupakan suatu hal yang perlu dan mendesak untuk segera direalisasikan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dimasa yang akan datang.

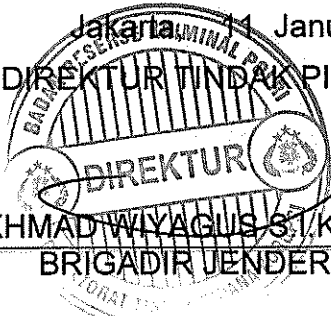
## **D. PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Walaupun pimpinan telah mengambil langkah-langkah terobosan melalui pembentukan beberapa satuan tugas dalam rangka melaksanakan fungsi utama dan fungsi pendukung bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, akan tetapi secara prinsip satuan tugas ini tidak dapat bergerak secara leluasa dan kurang efektif karena belum didukung dengan pemuatan dalam struktur organisasi.

### **SARAN**

Diharapkan adanya perubahan struktur organisasi pada Dittipidkor Bareskrim Polri sehingga terlaksananya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pada akhirnya perbaikan sarana dan prasarana secara bertahap yang tujuannya menciptakan suasana kerja dilingkungan Dittipidkor Polri yang semakin Profesional, Modern, Terpercaya.

Jakarta, 14 Januari 2016  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
  
AKHMAD WIYAGUS S.T.K., S.H., M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI